

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4(1), 23-27.
- Ajamsaru, Y., Rorong, A. J., & Londa, V. (2016). Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(41).
- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD)(Penelitian pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik): bahasa indonesia. *Publika*, 2215-2230.
- Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9116.
- Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: KOMPAK.
- Herawati, H., Lukman, L., & Useng, A. R. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 9-17.
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101-116.
- Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nesia, D. H. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam. SKRIPSI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (2016).*

- Pitriani, Yanti, D. A., & Ginting, S. (2020). Pitriani *et al.* 3(1), 331-346.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 281–298
- Puspitasari, R., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes (Studi di Desa Mojogede, Gresik)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Putra, R. O. (2020). *Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Milyar oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Rahmasari, B. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Mandiri*. Renaissance LEX, 5(2), 488–507.
- Rodiah, S., Azhari, I. P., Armel, R. S., Marlina, E., Putri, A. A., Azmi, Z., ... & Rahayu, N. (2021). Peran BPD Sebagai Mitra Pemdes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 1(2), 65-70.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Rusmianto, R., Maryani, M., & Makhsun, A. (2018). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap hubungan antara pengetahuan badan permusyawaratan desa (Bpd) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 12(1), 32-44.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 1*.
- Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke-24 ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74.

- Tede, R., Budiarmo, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115-125.
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92-120.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).*
- Wawointana, T. V. V., Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. (2017). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Wulandari, R., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(2), 101-107.
- Zharfan, Q. A., & Tauran, T. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Di Desa Canggau (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggau). *Publika*, 2519-2532.